

PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA

Kodiran*)

Tulisan ini merupakan sebuah ikhtisar yang secara ringkas menguraikan simpul-simpul dari konsep-konsep teoritik tentang mekanisme dinamika kebudayaan, yaitu inovasi, difusi, akulturasi, dan asimilasi, serta mengilustrasikan beberapa peristiwa utama mengenai perkembangan dan perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang ditimbulkan oleh adanya proses-proses mekanisme dinamika kebudayaan tersebut.

Di dalam Antropologi Budaya disebutkan ada sejumlah sifat atau karakter kebudayaan. Selain bersifat terbagi (Swartz dan Yordan, 1969:43), terpola (Kottak, 1994) dan adaptif (Ember dan Ember, 1977), kebudayaan juga bersifat harus dipelajari dan memaksa (Haviland, 1988), superorganik (Kroeber, 1948), serta adaptif dan berubah atau dinamis (Heider, 1997).

Adapun sifat dinamis kebudayaan yang berwujud pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan yang berawal dari perkembangan akal budi manusia dapat membawa berbagai perubahan peri kehidupan manusia dalam pergaulan hidup

dan perhubungan sosial sehari-hari. Berbagai macam rekaan yang merupakan hasil karya akal budi daya manusia itu dapat berwujud ide-ide, cita-cita, nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan, serta kepercayaan (sistem budaya), di samping perilaku-perilaku yang berpola pada individu-individu dalam kehidupan masyarakat (sistem sosial), dan beraneka ragam benda-benda (kebudayaan materi). Semua perkembangan kebudayaan materi dan nonmateri tadi dapat menimbulkan banyak perubahan pada sejumlah unsur-unsur umum kebudayaan (*cultural universals*), seperti sistem bahasa, sistem ekonomi, sistem

Kodiran, Guru Besar Ilmu Antropologi Budaya, Fakultas Sastra, Staf Pengajar S2 Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada.

pengetahuan, sistem teknologi, sistem organisasi sosial, sistem kesenian, dan sistem religi (Herskovits, 1948).

Mekanisme Dinamika Kebudayaan

Berbicara tentang mekanisme dinamika kebudayaan yang di muka disebut dengan inovasi (Barnett, 1953), ada yang berupa penemuan-penemuan baru sebagai hasil dari serangkaian percobaan (*invention*), seperti penciptaan teori dalam ilmu pengetahuan dan pembuatan alat serta perlengkapan hidup yang baru. Selain dari itu, ada juga yang ditemukan secara langsung tanpa melalui uji coba atau rekayasa (*discovery*), seperti penemuan benua, sungai, gunung, tumbuh-tumbuhan, dan penemuan pada unsur-unsur alam lainnya. Dalam hal ini antara keduanya terdapat hubungan satu sama lain. Suatu penemuan baru yang disebut *discovery* dapat menjadi suatu *invention*. Hal itu dapat terjadi jika masyarakat sudah menerima, mengakui, serta menerapkannya di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Rogers dan Shoemaker, 1986)

Perlu diketahui, bahwa pada kenyataannya, semua penemuan baru (inovasi) sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh ber-

bagai sifat, sikap, dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Yakni sifat tradisional dan modern, sikap konservatif dan progresif, serta kemampuan-kemampuan bereaksi dan kematangan pribadi dari warga masyarakat sendiri. Selain itu, suatu inovasi akan terpacu jika-lau terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut: (1) Ada sebagian di antara anggota masyarakat yang merasa sadar akan kekurangan-kekurangan ataupun keterbelakangannya di berbagai bidang, baik itu sosial, budaya, ekonomi, ataupun politik sehingga timbul rasa tidak senang terhadap kehidupan masyarakatnya. Dengan motivasi serta inisiatif tertentu, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif, mereka berupaya menciptakan penemuan-penemuan dan pembuatan-pembuatan terobosan baru untuk mengubah serta mengembangkan tata kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik, (2) Ada di antara anggota masyarakat yang merasa tidak puas terhadap apa yang dimilikinya karena dipandang belum memadai dalam hal mutu atau kualitas taraf kehidupannya sehingga mereka berusaha menambah penemuan-penemuan baru yang belum pernah tercapai pada tahap-tahap kehidupan masyarakat sebelumnya dan (3) Ada sistem perangsang (insentif)

yang akan diberikan kepada setiap warga masyarakat yang berprestasi dalam membangun kesejahteraan hidup masyarakat pada khususnya dan manusia pada umumnya.

Perlu diketahui bahwa semua hasil inovasi atau penemuan baru itu pada umumnya baru diterima oleh suatu masyarakat kalau (1) ide-ide dan benda-benda baru hasil inovasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat penerima, (2) produk inovasi tersebut mudah dipelajari, (3) hasil penemuan baru itu berguna bagi kemajuan hidup masyarakat, (4) penemuan-penemuan baru yang dihasilkan dapat memberi kepuasan terhadap kebutuhan hidup masyarakat, (5) hasil inovasi dikembangkan dan disebarluaskan oleh kalangan orang-orang yang kompeten, dan (6) gagasan-gagasan serta benda-benda baru hasil inovasi didukung oleh sponsor dari warga masyarakat setempat (Doob, 1968).

Perkembangan suatu kebudayaan dapat juga terjadi karena ada mekanisme-mekanisme dinamika kebudayaan yang berasal dari luar pendukungnya. Sampai sekarang masih banyak dijumpai bangsa-bangsa ataupun masyarakat di wilayah tertentu yang kebudayaan mereka lebih cepat tumbuh dan berkembang justru berkat pengaruh

mekanisme dinamika kebudayaan yang bukan dari hasil inovasi. Peristiwa ini terjadi karena proses penemuan baru dari dalam masyarakat berlangsung lama sehingga hasilnya sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman.

Adapun mekanisme dinamika kebudayaan yang berasal dari luar adalah difusi (*diffusion*), akulturasi (*acculturation*), dan pembauran (*assimilation*). Dalam konteks ilmu sosial budaya, difusi berarti persebaran unsur-unsur umum kebudayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain di wilayah tertentu. Pada masa lalu persebaran sejumlah unsur-unsur umum kebudayaan ini berlangsung melalui migrasi atau perpindahan penduduk. Peristiwa ini sudah terjadi sejak jaman purba dan berjalan secara berantai (*stimulus diffusion*). Akan tetapi, pada masa sekarang ini persebaran kebudayaan bergerak jauh lebih cepat dan sangat kompleks berkat kemajuan-kemajuan di bidang teknologi komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi transportasi, serta media cetak. Semua ini telah mempercepat dan mempermudah proses persebaran kompleks unsur-unsur umum kebudayaan, bahkan hal itu mampu meningkatkan informasi tentang kemajuan mutakhir berbagai ilmu penge-

tahuan, teknologi, dan lain-lain.

Erat berkaitan dengan persebaran kompleks unsur umum kebudayaan di atas, khususnya yang dilakukan lewat media audiovisual, seperti film, televisi, video kaset, dan lain-lain peralatan multimedia, baik yang berupa unsur-unsur kebendaan, gerakan, tingkah laku, maupun sikap-sikap tertentu, semuanya dapat membawa pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat. Terutama pengaruh negatif atau yang berakibat buruk karena bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, akan menyebabkan penghancuran kebudayaan (*culture crash*), perusakan moral (*demoralization*), timbulnya tindak kekerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan sosial lain pada kelompok-kelompok warga masyarakat setempat.

Selanjutnya, mekanisme dinamika kebudayaan yang lain yang berasal dari luar, yaitu akulturasi. Akulturasi merupakan suatu pertemuan antara dua kebudayaan atau lebih yang satu sama lain amat berbeda (Beals, 1953:621-641). Misalnya pertemuan antara kebudayaan "asing" dengan kebudayaan "asli" atau kebudayaan setempat. Kontak-kontak kebudayaan semacam ini bisa berlangsung secara damai (pasifikasi) dan secara paksa (kolonisasi). Terlepas

dari kedua cara ini, dalam akulturasi selalu terjadi beberapa kemungkinan, yaitu ada kemungkinan unsur-unsur kebudayaan asing tersebut diterima atau ditolak oleh masyarakat setempat, dan ada kemungkinan unsur-unsur kebudayaan setempat tetap bertahan dan tidak berubah meskipun sudah ada unsur-unsur kebudayaan yang baru.

Adapun unsur-unsur kebudayaan asing itu mudah diterima oleh suatu masyarakat karena mempunyai sejumlah prinsip, yaitu (1) unsur-unsur kebudayaan asing tersebut konkret, dalam arti dapat dilihat, dideengar, dirasa, diraba, dan dinikmati atau *principles of concreteness*, (2) unsur-unsur kebudayaan asing itu berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup masyarakat atau *principles of utility*, (3) unsur-unsur kebudayaan asing tadi mempunyai fungsi, yaitu dapat dipakai untuk menggantikan unsur-unsur kebudayaan yang sudah ada atau *principles of function* (Merton, 1949:32-34), dan (4) unsur-unsur kebudayaan asing tersebut dapat diintegrasikan ke dalam unsur-unsur kebudayaan setempat atau *principles of integration* (Parson, 1936:536).

Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa unsur-unsur kebudayaan setempat atau unsur-unsur kebudayaan "asli" akan tetap bertah-

an sekalipun telah berkembang unsur-unsur kebudayaan yang baru. Hal itu dikarenakan unsur-unsur kebudayaan lokal tersebut sudah sejak dini diajarkan dan dibiasakan atau *principles of early learning theory* (Bruner, 1955:605-623). Misalnya, sistem kepercayaan (*belief system*), pandangan hidup (*world view*), kebiasaan makan (*eating habit*), sistem kekerabatan (*kinship system*), dan lain-lain hal yang bersifat kejiwaan.

Dalam pada itu, akulturasi ini menurut Haviland (1988) dapat menimbulkan bermacam-macam peristiwa budaya berupa (1) penambahan unsur-unsur budaya baru (*addition*), (2) perpaduan unsur-unsur kebudayaan dengan tidak menghilangkan jati diri atau identitas kebudayaan masing-masing (*syncretism*), (3) penghancuran kebudayaan setempat (*deculturation*), (4) penolakan unsur-unsur kebudayaan asing (*rejection*), dan (5) keinginan untuk kembali kepada keaslian kebudayaan (*origination*).

Akhirnya, berbicara tentang mekanisme dinamika kebudayaan yang disebut asimilasi, itu adalah suatu proses yang terjadi karena ada pertemuan intensif dan yang berlangsung relatif lama di antara mereka yang berlainan latar belakang ras, suku bangsa, golongan, dan ke-

budayaannya. Pada umumnya asimilasi atau pembauran dapat terwujud melalui bermacam-macam cara. Beberapa di antaranya ialah (1) menyesuaikan diri dengan pola-pola kebudayaan masyarakat sekitar, (2) mengikuti perkumpulan-perkumpulan dan memasuki lembaga-lembaga masyarakat yang ada, (3) bersikap tidak menentang dan berprasangka terhadap kelompok masyarakat setempat, dan (4) menerima status kewarganegaraan suatu bangsa lain (Gordon, 1964). Kecuali itu, asimilasi juga mungkin terjadi dengan melewati perkawinan (*amalgamation*). Dalam hal ini pembauran akan berjalan lebih cepat karena terdapat sejumlah faktor, yaitu (1) adanya kesempatan berusaha yang saling melengkapi sehingga masing-masing pihak merasa saling membutuhkan dan berkompetisi, (2) sikap saling menghargai dengan cara mengakui kelemahan dan kelebihan masing-masing kelompok sosial dan kebudayaannya, (3) sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di dalam kehidupan masyarakat, (4) melakukan perkawinan campur, dan (5) persamaan unsur-unsur kebudayaan yang terdapat pada masing-masing masyarakat (Soekanto, 1975: 208).

Namun demikian, dalam banyak kejadian, proses asimilasi

seringkali terhalang oleh sejumlah faktor sosio-psikologis berikut ini. (1) Perasaan takut terhadap kebudayaan lain karena khawatir kebudayaannya akan dihancurkan atau dihapuskan oleh yang lain, (2) Kurang pengetahuan tentang kebudayaan lain. Dari sini sikap toleransi dan simpati belum berkembang di antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya yang disebabkan pengetahuan mereka masing-masing masih terbatas kepada unsur-unsur kebudayaan tertentu, (3) Perasaan superioritas pada individu dari satu kebudayaan terhadap individu dari kebudayaan lain, (4) Terisolasinya kehidupan suatu golongan masyarakat tertentu dalam masyarakat sehingga berakibat pada tidak adanya kebebasan bergaul dengan masyarakat di luar golongannya. Sebaliknya, masyarakat kurang memahami kebudayaan golongan masyarakat tersebut sehingga menimbulkan perasaan berprasangka yang dapat menghalangi berlangsungnya asimilasi. (5) Suatu *in group feeling* yang kuat, yaitu suatu perasaan individu yang terikat sekali dengan kelompok sosial dan kebudayaan sendiri.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, sesungguhnya asimilasi itu sangat baik bagi negara yang multietnis, dalam arti menumbuhkembangkan masyarakat

dan kebudayaan baru yang menghilangkan ciri khas masing-masing kelompok masyarakat. Akan tetapi, proses pembauran yang berlangsung tersendat-sendat, bahkan gagal sama sekali, akan membangkitkan perasaan kesukuan (ethnosentrisme) dan disintegrasi bangsa (Koentjaraningrat, 1984).

Perkembangan Kebudayaan dan Perubahan Sosial di Indonesia

Berikut ini akan disajikan berturut-turut ilustrasi berbagai fenomena perkembangan kebudayaan dan implikasinya terhadap perubahan sosial yang terjadi selama ini sebagai akibat dari difusi, akulturasi, dan asimilasi di kepulauan Nusantara.

Tanpa mengenyampingkan arti dan peranan penting penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan oleh kelompok-kelompok komunitas serta warga masyarakat di seluruh pelosok tanah air, baik yang berwujud karya-karya seni rakyat, teknologi tradisional, pengetahuan lokal, ataupun sistem organisasi sosial, di sini di tampilkan beberapa ragam pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan beserta implikasi-implikasi sosialnya, khususnya yang disebabkan oleh masing-masing mekanisme dinamika kebudayaan tersebut.

Dari hasil studi dan penelitian Paleoantropologi dan Arkeologi di Indonesia telah ditunjukkan bahwa pada masa lampau pernah berdatangan kelompok-kelompok manusia berciri ras *Austro-Melanesoid* ke kepulauan Nusantara. Mereka merupakan nenek moyang dari orang Wajak yang kemudian bergerak ke wilayah timur Indonesia dan mendiami pulau Irian sebelum jaman es ke-4 (Koentjaraningrat, 1999: 4). Dalam kehidupan sehari-hari mereka dikenal sebagai kelompok peramu (*food gatherer*) dan pencari ikan di muara sungai-sungai di dekat pantai dan pemburu binatang di hutan-hutan. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka ini terus menyebar ke arah timur dan kemudian mengembangkan suatu kebudayaan pantai. Mereka dikenal sebagai pembuat perahu lesung bercadik. Perahu ini semula dipakai untuk mencari ikan di rawa-rawa dan di muara-muara sungai dengan menyusuri pantai. Selanjutnya mereka menyebar ke pulau-pulau di depan pantai pada waktu keadaan cuaca baik.

Adapun orang-orang Austro-Melanesia lainnya, terutama yang berdiam di wilayah bagian barat kepulauan Nusantara, berhasil mengembangkan suatu kebudayaan yang sama dengan mereka yang tinggal di kawasan

timur Indonesia. Hanya saja mereka sudah pandai membuat alat yang bersifat khas pada gaya peralatan baru yang berupa kapak-kapak genggam terbuat dari batu berbentuk lonjong dengan satu sisi bekas pecahan yang kasar dan satu sisi luar yang diupam lebih halus.

Kemudian datang kelompok manusia gelombang kedua yang berasal dari daratan Asia Tenggara yang berciri ras Mongoloid. Mereka ini dikenal sebagai bangsa-bangsa pembawa kebudayaan neolitik atau batu baru. Dalam pembicaraan sehari-hari mereka mempergunakan bahasa Proto-Austronesia dan mereka sudah mengenal kepandaian bercocok tanam meskipun belum memakai sistem pengairan. Bersamaan dengan itu kelompok orang Proto-Austronesia yang tersebar ke seluruh penjuru tanah air mengembangkan kebudayaan kapak lonjong.

Akhirnya, gerakan migrasi penduduk berikutnya yang terjadi pada masa prehistori ini ialah persebaran manusia atau bangsa-bangsa yang mempunyai kepiawaian membuat benda-benda dari bahan perunggu. Benda-benda peninggalan mereka pertama kali ditemukan di Dongson, sebuah wilayah di negara Vietnam (Goloubew, 1929: 1-46). Di antara benda-benda yang terbuat dari bahan

perunggu tersebut berwujud nekara perunggu, kapak perunggu, bejana perunggu, cendrasa perunggu, perlengkapan perhiasan yang terdiri atas gelang, kalung, manik-manik, arca, mata uang, dan alat serta perlengkapan yang terbuat dari besi. Di sini benda-benda perunggu yang berasal dari jaman pre-sejarah ditemukan di pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan kepulauan Maluku, serta pulau Papua.

Proses difusi ini terus berlanjut hingga pada masa sejarah di sekitar abad ke-4 Masehi. Pada masa ini secara bergelombang dan bergantian telah menyebar kebudayaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Pengaruh dari kedua kebudayaan tersebut berupa (1) munculnya pelapisan sosial yang bersifat resmi atau sistem kasta, (2) berdirinya bentuk negara kerajaan, (3) upacara-upacara kenegaraan, (4) kesusastraan Hindu, (5) agama Hindu dan agama Buddha, dan (6) kegiatan perdagangan. Selain itu, di beberapa wilayah Nusantara ini berdiri negara-negara kerajaan seperti Kerajaan Kutai pada abad ke-6 di Kalimantan Timur, Kerajaan Sriwijaya di pulau Sumatera, Kerajaan Mataram kuno di pulau Jawa, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur yang mencapai puncak

kejayaannya pada pertengahan abad ke-14 Masehi.

Kelanjutan dari bentuk dan sistem pemerintahan negara kerajaan tersebut adalah berkembangnya sistem kepercayaan dalam konsepsi agama Hindu tentang raja keturunan dewa (*King-God*). Sesudah itu, kira-kira pada abad ke-13 dan abad ke-15, yaitu bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, timbul gelombang kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, khususnya di berbagai wilayah di sepanjang pantai Aceh, Banten, pantai utara Pulau Jawa, dan di Sulawesi Selatan. Pada masa ini telah tumbuh dan berkembang aktivitas perniagaan di samping kegiatan penyiaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali. Sementara itu, di daerah-daerah lain yang belum begitu banyak terpengaruh kebudayaan Hindu, agama Islam memiliki daya pengaruh yang kuat serta mendalam dalam kehidupan penduduk. Misalnya di daerah-daerah itu kemudian terdapat santri, yaitu orang-orang yang taat menganut ajaran dan syaria Islam.

Selanjutnya pada paruh pertama abad ke-16, mulai masuk pengaruh kebudayaan Eropa yang diawali dengan kegiatan perdagangan oleh orang-orang Portugis, Spanyol, Inggris, dan

Belanda. Terutama kedatangan orang-orang Belanda di sini berlanjut dengan kolonisasi, khususnya setelah pemerintahannya berhasil mengambil alih kekuasaan dari perusahaan dagang V.O.C. pada tahun 1799. Pemerintah Belanda kemudian mendirikan pusat-pusat kekuasaan di kota-kota propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Mulai saat itu tumbuh dan berkembang wilayah perkotaan dengan gedung-gedung pemerintahan serta tempat tinggal maupun pusat-pusat pertokoan barang-barang kelontong, pasar, pertukangan, dan industri kecil selain tempat-tempat pendidikan yang khusus diperuntukkan bagi kelompok komunitas sendiri dan kelompok anggota masyarakat tertentu. Sebagai konsekuensinya, di dalam kota-kota pusat pemerintahan di pulau Jawa, Sulawesi Utara, dan kepulauan Maluku muncul suatu sistem pelapisan sosial yang terdiri atas lapisan sosial kaum buruh yang sudah banyak meninggalkan pekerjaannya sebagai petani. Mereka kemudian bekerja menjadi tukang, pelayan, pegawai, buruh industri kecil, dan pekerja para pedagang Cina. Sementara itu lapisan sosial kedua terdiri atas para pegawai pemerintah jajahan yang di kalangan masyarakat Jawa dikenal sebagai kaum priyayi. Dalam pada itu, di be-

berapa daerah lain di tanah air mulai berkembang suatu golongan pedagang yang menduduki sektor-sektor ekonomi tingkat menengah yang belum ditempati oleh orang-orang Cina. Suatu hal yang amat menonjol dalam masa penjajahan ini ialah merebaknya gaya hidup yang pada waktu sebelumnya tidak pernah ada, yaitu sikap mental pegawai yang lebih banyak berorientasi kepada atasan, status sosial, dan prestise (Koentjaraningrat, 1971).

Dalam pada itu, berkembangnya sistem pendidikan sekolah-sekolah Belanda telah memperluas pengaruh kebudayaan Eropa ke dalam kebudayaan Indonesia yang bersifat prinsip, yaitu tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akhirnya, salah satu pengaruh dari kebudayaan Eropa yang masuk ke dalam kebudayaan di sini ialah persebaran agama Nasrani yang terdiri atas agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Keduanya secara sengaja diorganisir oleh organisasi-organisasi keagamaan, di antaranya Susteran, Missi, dan Zending di wilayah-wilayah yang belum pernah dimasuki oleh Agama Hindu, Buddha, dan Agama Islam. Misalnya di daerah-daerah kawasan Indonesia Timur, seperti Kepulauan Maluku Tengah dan Selatan, Sulawesi Utara,

Sulawesi Tengah dan Selatan, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, serta di daerah pedalaman Pulau Kalimantan.

Perkembangan dan Perubahan Sosial Budaya Pasca Kemerdekaan

Perkembangan kebudayaan di Indonesia semakin bertambah intensif dan berimplikasi luas terhadap perubahan sosial berlangsung pada era pasca kemerdekaan. Pada masa ini perkembangan unsur-unsur umum kebudayaan dan perubahan masyarakat meluas dan cukup kompleks, terutama sekali disebabkan oleh asimilasi dan akulturasi. Masing-masing telah mempercepat proses pembauran antarwarga masyarakat serta perpaduan kebudayaan, selain juga memicu munculnya pemikiran-pemikiran modern.

Pada masa kemerdekaan ini, proses pembauran antarwarga masyarakat di atas tidak terbatas hanya antaretnik, tetapi juga telah terjadi antarras. Intensitas proses pembauran itu dapat dikatakan terjadi berkat keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang berupa transportasi dan komunikasi sehingga mempermudah pertemuan antarsuku bangsa dan kelompok-kelompok ras lain yang

dahulu bertempat tinggal di wilayah tertentu dengan mereka yang berada di daerah lain. Dalam proses pembauran ini, selain ada yang dilakukan secara individual melalui penyesuaian budaya dan perkawinan, ada pula yang dilaksanakan secara institusional. Dalam bentuk organisasi dan kelembagaan, pembauran terutama dilakukan oleh kelompok etnik Cina melalui lembaga-lembaga, di antaranya organisasi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) yang dibentuk pada tahun 1954, Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang didirikan pada tahun 1961, dan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB) yang diresmikan pada tahun 1977 (Jahja, 1983).

Pembauran tersebut, baik yang dilakukan secara budaya, biologi, ataupun kelembagaan, lambat laun telah mengurangi sikap-sikap etnosentrisme ataupun eksklusivisme, yaitu tumbuhnya keterbukaan terhadap kelompok-kelompok etnik dan ras lain dalam bentuk kerjasama, perkawinan campur, dan lain sebagainya. Di samping itu, berlangsungnya pembauran antarwarga masyarakat juga menghasilkan berkembangnya bermacam-macam kesenian, ragam busana dan bujana yang berasal dari berbagai kelompok-kelom-

pok ras, suku bangsa, dan lain-lain golongan warga masyarakat yang bernuansa kebudayaan Cina, Islam, Eropa, Amerika, India, dan lain sebagainya.

Adapun perkembangan kebudayaan lainnya yang berasal dari kontak kebudayaan atau akulturasi (Herzkovits, 1958), terus berlanjut melalui hubungan-hubungan secara langsung dalam bentuk (1) kerjasama-kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan, (2) penyelenggaraan program-program pertukaran ilmuwan dan kebudayaan, (3) pertemuan-pertemuan internasional dan regional, serta (4) kunjungan-kunjungan langsung dalam paket-paket pariwisata.

Sehubungan dengan kontak kebudayaan secara langsung dalam paket pariwisata, ternyata paket ini telah dijadikan industri pariwisata oleh pemerintah yang diharapkan dapat menambah penerimaan devisa negara di samping akan memperluas kesempatan kerja dan melestarikan kebudayaan Indonesia (Yoeti, 1977). Oleh karena itu, kegiatan ini dituangkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Sejak saat itu, segala upaya untuk meningkatkan pengembangan industri pariwisata, baik yang dilakukan oleh

pemerintah maupun yang dikelola oleh pihak swasta, mulai digalakkan dan diintensifkan (Kodhiyat, 1989). Salah satu dari kegiatan itu ialah dicanangkannya tahun 1991 sebagai tahun kunjungan wisata yang dikenal dengan Visit Indonesia Year.

Industri pariwisata tersebut telah membawa sejumlah perkembangan kebudayaan materi dan immateri. Usaha perhotelan, restoran, sarana transportasi, dan komunikasi, lembaga-lembaga pendidikan kepariwisataan, industri kecil, perubahan norma-norma, serta gaya hidup semakin meningkat. Khususnya perubahan dalam kedua aspek kebudayaan immaterial ini ada yang positif dan ada pula yang negatif. Perubahan yang positif itu, dalam arti berguna bagi kemajuan ataupun perkembangan masyarakat di perkotaan dan pedesaan, ialah munculnya gaya hidup modern, yaitu gaya hidup rasional, kompetitif, prestasi individual, dan mementingkan efektivitas dan efisiensi. Sedangkan perubahan norma dan gaya hidup yang negatif itu berupa merebaknya pola hidup konsumtif, meningkatnya kebebasan di dalam pergaulan hidup dan perhubungan sosial sehari-hari yang menjurus ke arah kebebasan dalam hubungan seksual, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan (*kumpul kebo*), menjamurnya

praktik-praktik prostitusi (Kodiran, 1996), dan komersialisasi seni maupun tradisi (Yoeti, 1990). Kedua hal yang terakhir yang semula bersifat sakral dipergelarkan sekadar untuk mendapatkan keuntungan guna memuaskan kebutuhan para wisatawan. Sebagai contoh, pada upacara Kasodo di masyarakat Tengger terdapat kecenderungan untuk tidak lagi sepenuhnya berpegang pada tradisi dan kepercayaan setempat. Mereka lebih mengutamakan untuk mempersiapkan hal-hal yang dapat mendatangkan keuntungan material (Marianno, 1993/1994:84.85).

Peristiwa semacam itu juga terjadi di masyarakat Bali. Di Bali dijumpai ritus-ritus keagamaan yang hidup di kawasan tertentu yang oleh sebagian komunitasnya diselenggarakan dengan memperhitungkan waktu dalam pelaksanaannya. Misalnya dalam upacara manusia yadna yang dilakukan di Ubud, penyelenggaraanya dipilih pada hari yang mendekati bulan-bulan kunjungan wisatawan. Dari informasi dan interpretasi yang diperoleh, pemilihan waktu itu dilakukan untuk (1) memberi kesempatan lebih banyak kepada anggota kerabat guna menyatakan rasa bela sungkawa, (2) memberi kesempatan kepada pihak yang mempunyai upacara

berbuat potlat (*potlach*), suatu kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada orang dengan harapan memperoleh imbalan, (3) memperlihatkan status sosial kepada masyarakat luas, dan (4) memberi kesempatan kepada para wisatawan untuk mengamati, membuat kontrak dokumentasi atas ritus tersebut. Tampak bahwa ada pertimbangan rasional yang masuk ke dalam upacara religi tersebut (Depdikbud, 1993/94:112).

Adapun implikasi industri pariwisata ini terhadap kehidupan sosial di antaranya ialah tumbuhnya kelompok-kelompok kesatuan sosial baru yang terdiri atas para pengusaha dan karyawan di sektor industri jasa, seperti perhotelan, rumah makan, angkutan, industri kerajinan, pedagang asongan, dan kelompok sosial lain yang berperan dalam pelayanan umum (*public service*).

Selanjutnya, perkembangan industri pariwisata juga telah menimbulkan diversifikasi lapangan pekerjaan terutama pada mereka yang berada di dalam maupun di luar daerah tujuan wisata. Industri pariwisata ini juga menarik pendatang baru yang berasal dari daerah-daerah lain sehingga merangsang mobilitas sosial yang umumnya digerakkan oleh motif-motif ekonomi, yaitu untuk

memperoleh pekerjaan yang akan meningkatkan penghasilannya. Semuanya itu seringkali menyebabkan pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan membawa konsekuensi pada pengadaan sarana dan prasarana sosial. Sebagai misal kasus perkembangan pariwisata di Prawirotaman, sebuah perkampungan yang terletak di wilayah selatan kota Yogyakarta. Di tempat ini telah terjadi alih profesi dari yang semula pengusaha batik dan tenun ke usaha rumah penginapan (*guest house*) untuk para wisatawan. Proses alih profesi tersebut didukung oleh pembukaan restoran, art shop, biro perjalanan, dan tempat penukaran uang (*money changer*). Mereka berganti pekerjaan karena pada tahun 1980-an kedua jenis usaha itu mengalami kemunduran bahkan kemerosotan disebabkan oleh menurunnya pemakaian serta munculnya kreasi-kreasi baru. Sementara itu, bagi para pekerja batik dan tenun kebanyakan tidak mengikuti usaha juragannya untuk bekerja sebagai karyawan di rumah penginapannya. Mereka lebih suka mencari pekerjaan lain yang tidak memerlukan penampilan serta ketrampilan tertentu yang membutuhkan tambahan pendidikan (Murniatmodkk, 1993/1994).

Perkembangan kebudayaan

di Indonesia dalam era kemerdekaan terasa semakin cepat dan mencapai puncaknya pada dua dekade terakhir menjelang tahun 2000, yaitu tepatnya di tahun 1980-an. Didahului oleh perubahan-perubahan di bidang politik, seperti berdirinya banyak organisasi politik (partai politik) pada tahun 1950-an (Wertheim, 1958), pembentukan lembaga perwakilan rakyat (Komite Nasional Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tahun 1960-an, serta pergantian tatanan kepemimpinan nasional (orde lama ke orde baru) pada tahun 1966, terjadilah perkembangan kebudayaan dan perubahan sosial yang cukup mendasar. Dalam hal ini menurut M. Habib Chirzin dalam tulisannya tentang "Akar-Akar Perubahan: Pencaharian Etos dan Transendent Perspektif", yang dimuat dalam buku Rusli Karim yang berjudul *Seluk Beluk Perubahan Sosial* (tanpa tahun, halaman 21), peristiwa ini ditandai dengan emansipasi intelektual dan kultural. Kedua perkembangan dan perubahan sosial-budaya tersebut mempunyai arti penting bagi kelangsungan eksistensi masa depan peradaban dan kemanusiaan di dunia umumnya.

Dengan terjadinya transisi sosial-budaya yang cukup mendasar tersebut, maka mulai saat

itu banyak birokrat dan teknokrat pengambil kebijakan dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, serta para aktivis lainnya berupaya melakukan peninjauan kembali dan mengkaji ulang paradigma-paradigma, pandangan-pandangan, dan cara-cara ataupun strategi-strategi lama yang pernah dikembangkan. Begitu juga yang diterapkan pada program-program pembangunan diganti dengan yang baru dalam menyusun agenda pembangunan di segala bidang di dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sehubungan dengan hal itu terdapat sejumlah masalah penting yang diredifinisi, khususnya berkaitan dengan konsep pembangunan yang lebih kontekstual, yakni yang menekankan pembangunan manusia daripada pembangunan materi (Harrison, 1980). Oleh karena itu, di dalam melaksanakan program-program pembangunan selanjutnya telah dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan latar belakang sosial-budaya, kesejahteraan bangsa, dan aspirasi masyarakat. Selain itu, masalah lain yang juga penting untuk ditinjau kembali dan selanjutnya ditumbuhkembangkan di masa-masa yang akan datang ialah masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi antarsuku bangsa, revitalisasi

nilai-nilai demokrasi, dan aktualisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan sampai pada implementasinya.

Sementara itu, adanya beragam pemikiran yang berkembang dewasa ini menandakan kuatnya rasa kesadaran baru terhadap keinginan untuk merombak prinsip-prinsip pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penghayatan serta pengamalan nilai-nilai demokrasi yang hakiki di dalam tata kehidupan sosial, dari lingkup lokal, regional, nasional hingga internasional. Ini semua sejalan dengan agenda reformasi yang tiada henti di dalam mengembangkan tata kehidupan sosial dan budaya baru di Indonesia.

Hambatan-Hambatan Dinamika Sosial Budaya

Namun demikian, dinamika kebudayaan dan perubahan sosial tersebut hingga saat ini terasa belum berjalan mulus, bahkan tersendat-sendat, sarat dengan berbagai hambatan. Secara empirik, saat sekarang ini masih dijumpai berbagai rintangan, baik yang bersifat sosial maupun budaya (Abraham, 1991).

Hambatan-hambatan yang bersifat sosial itu di antaranya

adalah (1) tindakan yang tidak disiplin dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan, ekonomi, dan politik, (2) perilaku yang tidak terbuka dalam mencari ide-ide serta pengalaman-pengalaman baru, dan (3) tindakan memperkokoh kedudukan yang melawan arus perubahan dan pembaharuan masyarakat dan kebudayaan (*status quo*).

Rintang-rintang yang bersifat budaya berupa sikap mental yang berorientasi kepada nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modernisasi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada sikap pribadi dan sikap sosial dalam bidang ekonomi dan politik yang satu sama lain saling berkaitan (Wiener, 1975). Hingga saat ini, di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih terdapat (1) orientasi nilai budaya yang tidak menyadari akan arti mutu atau kualitas. Di sini ada kecenderungan seseorang untuk mengabaikan norma-norma yang berlaku (kasus-kasus pemalsuan ijazah, merek usaha dagang, dan lain-lain peniruan hasil produksi). Selain itu di sini juga masih berkembang (2) sikap untuk mencapai suatu tujuan ataupun kepentingan tertentu secepat-cepatnya dengan mengabaikan upaya-upaya kerja keras dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut. Menurut sinyalemen

sementara para pengamat sosial dan kebudayaan, di dalam masyarakat Indonesia dewasa ini kelihatan terlampau banyak para usahawan baru yang memamerkan kehidupan yang mewah dalam waktu secepat-cepatnya disertai cara-cara yang tidak lazim. Begitu pula tampak terlalu banyak karyawan-karyawan muda yang mau saja memperoleh fasilitas-fasilitas, pangkat-pangkat secepat-cepatnya dengan cara jalan pintas tanpa ada kerelaan berkorban dan berjuang melawan kesulitan-kesulitan dalam mencapai suatu ketrampilan serta kepakaran ilmiah (kasus-kasus pemalsuan uang, penipuan penelitian, penjiplakan tesis, pembajakan VCD, dan lain sebagainya). Sedangkan yang ke (3) di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih sering ditemui sikap tidak bertanggung jawab dari orang-orang tertentu (Koentjaraningrat, 1971). Sikap ini kelihatan dalam bermacam-macam kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, pergaulan (kasus pelecehan seksual), perjanjian-perjanjian yang bersifat ekonomi (kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI), serta dalam banyak hal yang menyangkut perawatan sarana dan prasarana baik untuk kedinasan pada instansi-instansi pemerintah maupun untuk kepen-

tingan umum.

Penutup

Dari serangkaian uraian di muka, tersirat adanya aneka ragam dan variasi perkembangan kebudayaan serta perubahan sosial yang terus berlangsung melalui mekanisme-mekanisme dinamika kebudayaan difusi, asimilasi, dan akulturasi, khususnya di Indonesia. Perkembangan kebudayaan berlangsung secara bertahap dan berangsur-angsur yang selanjutnya diikuti oleh perubahan sosial, seperti perubahan pola perilaku, struktur masyarakat, pranata sosial, serta gaya hidup (Soemardjan, 1981).

Semua perkembangan dan perubahan sosial budaya tersebut terkesan lebih banyak ditimbulkan oleh faktor-faktor yang datang dari luar daripada yang berasal dari dalam masyarakat. Selain itu, pluralisme kebudayaan dan heterogenitas masyarakat di tanah air ini merupakan hasil dari proses sejarah perkembangan kebudayaan dan masyarakat melalui mekanisme persebaran unsur-unsur umum kebudayaan, kontak-kontak kebudayaan, dan pembauran antar berbagai ras, bangsa, serta suku bangsa lain yang sudah berlangsung lama di seluruh pelosok wilayah kepulauan Nusantara.

Daftar Pustaka

- Abraham, M.F., 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan*. (terj. M. Rusli Karim). Judul Asli: *Perspectives on Modernization: Toward a General Theory of Third World Development*. Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana.
- Barnett, H.G., 1953. *Inovation: The Basis of Cultural Change*. New York: McGraw Hill Book Inc.
- Beals, R., 1953. "Acculturation". Dalam *Anthropology Today*, A.L. Kroeber, ed. Chicago: University of Chicago Press, hal. 621 - 641.
- Bruner, R.K., 1956. "Primary Group Experiences and the Proses of Acculturation". *American Anthropologist* No. 58. Menasha: American Anthropological Association, hal 605 - 623.
- Depdikbud, 1993/1994. *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Bali*. Jakarta: Dir. Sejarah dan Nilai Tradisional, hal. 112.
- Doob, W.L., 1968. "Psychological Aspects of Planned Development Change", dalam J.B. Aceves (ed.) *Identity, Survival, and*

- States of America: Mc. Graw Hil Inc.
- Kroeber, A.L., 1948. *Anthropology*. New York: Harcourt, Brade & Co.
- Marianno, F.P.dkk., 1993/94. *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial di Daerah Propinsi Jawa Timur*. Jakarta: Dirjen Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, hal. 84-85.
- Merton, R.K., 1949. *Social Theory and Social Structure*. Glencoe: Free Press, hal. 32 - 34.
- Rogers, E.M. dan F.L. Shoemaker, 1986. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*. (terj. A. Hanafi). Judul Asli: *Communication of Inovation*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Parson, E.C., 1936. *Mitla, Town of the Souls*. Chicago: University of Chicago Press, hal. 536.
- Soekanto, S., 1975. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hal. 208.
- Soemardjan, S., 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. (Terj. Kusumanto). Judul Asli: *Social Change in Jogjakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Swartz, M.J. dan David K. Jordan., 1969. *Culture: The Anthropological Perspective*. New York: John Wiley & Son. Hal. 43.
- Yoeti, A.O., 1977. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Praditya Paramita.
- _____, 1990. *Komersialisasi Seni Budaya dalam Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Wertheim, W.F., 1958. *Indonesian Society in Transtition: A Study of Social Change*. Bandung: Sumur Bandung.
- Wiener, M., 1975. *Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan*. USA: Voice of America Forum Lectures.